



Forum Nelayan Dunia [WFFP] UNTUK MUNDIAL DE PUEBLOS PESCADORES

FORUM MONDIAL DES POPULATIONAS DE PEC'HEURS

**Sekretariat Internasional, No.10,
Malwatta Road, Negombo, Sri Lanka.**

Perjuangan kita melawan Perampasan Laut dan untuk Kedaulatan Pangan: Kita tidak akan berkompromi! Posisi WFFP pada Konferensi Kelautan PBB.

Pernyataan WFFP tentang Konferensi Kelautan PBB ketiga di Nice, Prancis, 2025.

Tanggal 18 Maret 2025

28 tahun yang lalu, kami mendirikan Forum Dunia Masyarakat Nelayan (WFFP), sebuah organisasi masyarakat nelayan berbasis massa. Kami membentuk WFFP untuk memperjuangkan hak adat dan hak asasi manusia lebih dari 10 juta masyarakat nelayan, yang meliputi berbagai kelompok nelayan tradisional dan nelayan perempuan, pengumpul dan pengumpul makanan laut perempuan dan laki-laki dari 52 negara.

Proyek-proyek pembangunan yang digulirkan oleh perusahaan-perusahaan, pemodal, dan pemerintah di seluruh dunia, semakin merampas hak-hak masyarakat nelayan dari wilayah kami dan mengabaikan hak-hak adat kami. Meningkatnya otoritarianisme dan fasisme mengakibatkan militerisasi, kriminalisasi, dan kekerasan terhadap masyarakat kami. Ketika memprotes proyek-proyek pembangunan yang disebut-sebut itu di banyak negara, kami ditangkap dan dipukuli. Para pembela Hak Asasi Manusia dan lingkungan hidup kami semakin berisiko dikriminalisasi, ditangkap, diancam, dan dibunuh.

Agenda 30by30 – pelestarian benteng – didorong dari atas dengan Organisasi Lingkungan Hidup dan Perusahaan Transnasional sebagai agen yang kuat. Para pelaku ini berhasil mengembangkan rencana dan kebijakan bersama dengan pemerintah kita.

Hal ini didukung oleh yayasan filantropi yang beroperasi dengan anggaran besar yang seringkali melebihi anggaran nasional untuk departemen perikanan di negara kita. Bentuk penangkapan negara ini adalah kenyataan di seluruh dunia. Pemerintah sedang meloloskan reformasi yang mengkriminalisasi dan menargetkan cara hidup tradisional nelayan kita, membingkainya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, sementara mengabaikan bahwa komunitas nelayan adalah bagian dari warisan tradisi penangkapan ikan yang tidak dapat dipisahkan dari lautan, perairan, dan pesisir. Hal ini didorong sambil mengabaikan sepenuhnya pendorong sebenarnya dari kerusakan lingkungan, bencana iklim, dan perampasan masyarakat nelayan dari wilayah dan

sumber daya.

Di Belize, misalnya, The Nature Conservancy memainkan peran penting dalam menjadi perantara Pertukaran Utang-dengan-Alam. Restrukturisasi Utang Negara ini dinegosiasikan secara tertutup tanpa ada perdebatan publik dan baru kemudian kami mengetahui bahwa pemerintah Belize berkomitmen untuk mengembangkan Rencana Tata Ruang Laut dan melaksanakan rencana untuk memenuhi target 30x30. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan semua janji partisipasi dalam pengambilan keputusan dan prinsip-prinsip Pedoman PBB tentang Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan (Pedoman SSF). Hal ini memfasilitasi destabilisasi demokrasi kita yang berbahaya!

Kami tegaskan kembali – sebagaimana yang telah kami lakukan berkali-kali sebelumnya – komitmen kami untuk melanjutkan penerapan pedoman SSF, dan memperjuangkan kedaulatan pangan sebagai solusi pangan sehat berdasarkan hak adat, budaya, pengetahuan, dan tradisi kami.

Kami berjanji mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berakar kuat pada nilai-nilai yang menjadi dasar Piagam PBB: perdamaian, keadilan, rasa hormat, hak asasi manusia, toleransi, dan solidaritas. Untuk menegakkan nilai-nilai ini, setiap negara harus lebih konsisten memanfaatkan parlemen, pemerintah daerah, masyarakat sipil, serta cabang eksekutif pemerintah dalam tata kelola yang dipimpin negara demokratis yang menjadi dasar berdirinya PBB.

Kami tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Komite PBB untuk Keamanan Pangan Dunia (CFS), Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dan Komite Perikanan (COFI) untuk memajukan prinsip-prinsip utama pedoman SSF dan agenda kedaulatan pangan kami. Kami juga akan terus bekerja sama dengan lembaga dan organisasi PBB tentang Hak Asasi Manusia, termasuk Dewan Hak Asasi Manusia dan Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia. Lembaga-lembaga PBB ini menyerupai badan-badan PBB yang terstruktur secara demokratis, di mana kami diakui sebagai pemegang hak asasi manusia dan memiliki kesempatan nyata untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

WFFP tidak akan berpartisipasi dalam Konferensi Kelautan PBB ketiga!

Tidak ada organisasi yang akan mewakili WFFP di Konferensi Kelautan PBB. Sebaliknya, WFFP akan menyelenggarakan konferensi tandingan untuk menyuarakan pendapat kami dan memajukan solusi kami sendiri.

Konferensi Kelautan PBB bukanlah lembaga permanen. Konferensi ini merupakan acara berkala tingkat tinggi yang diputuskan oleh Majelis Umum PBB. Konferensi ini pada dasarnya berbeda dari FAO, misalnya, yang merupakan badan PBB yang terspesialisasi dengan struktur kelembagaan permanen, staf khusus, anggaran, dan mandat untuk melaksanakan keputusan. Konferensi Kelautan PBB dipimpin oleh dua negara tuan rumah bersama dan didukung oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (DESA), Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kelautan, dan pihak lain. Agenda dibentuk oleh para pelaku ini dengan masukan dari negara-negara anggota PBB, masyarakat sipil, dan pelaku sektor swasta. Proses persiapan melibatkan serangkaian pertemuan pemangku kepentingan yang didominasi oleh pelaku yang memiliki sumber daya yang kuat dan yang – secara praktis – tidak dapat kami akses.

Konferensi Kelautan PBB tidak menghasilkan perjanjian mengikat apa pun oleh pemerintah kami.

Sebaliknya, ia menyampaikan deklarasi yang dinegosiasikan. Deklarasi-deklarasi yang dikeluarkan oleh Dewan Kelautan PBB sebelumnya

Konferensi menentang beberapa posisi politik kami (www.wffp-web.org/declaration-wffp-8th-general-assembly-20-november-2024-brasilia-brazil-2/). Yang lebih mengkhawatirkan adalah budaya yang dibangun terkait dengan komitmen sukarela yang dibuat oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil di Konferensi Kelautan PBB. Pergeseran fokus ke arah komitmen sukarela, mengencerkan praktik keagenan dan demokrasi yang dijunjung tinggi oleh badan-badan PBB (misalnya FAO, CFS).

Konferensi Kelautan PBB memajukan solusi palsu seperti 'makanan biru' atau 'makanan akuatik', untuk mempromosikan reformasi kebijakan, deregulasi, dan investasi dalam akuakultur, yang tidak lain adalah peternakan pabrik industri makanan akuatik. Pengalaman kita dengan akuakultur, khususnya budidaya udang, sangat buruk dengan meningkatnya polusi (bahkan dari produsen bersertifikat), kerusakan mata pencaharian, ekologi, dan erosi hak-hak adat kita. Di beberapa negara, orang-orang kita ditangkap, dipukuli, dan dibunuh saat melawan praktik-praktik yang merusak.

Demikian pula, agenda 30by30 merampas hak-hak rakyat kita dari wilayah kita. Sementara kita dijanjikan pekerjaan dan pertumbuhan, yang kita alami adalah kriminalisasi, hilangnya wilayah, erosi sistem pangan lokal, dan pelanggaran hak-hak dasar untuk hidup dan mata pencaharian.

Dalam memperluas rezim konservasi benteng, agenda 30by30 menjadikan masyarakat nelayan kita sebagai sasaran kekerasan bersenjata, pelecehan, dan kekerasan dari lembaga penegak hukum, yang meningkatkan militerisasi tanah dan perairan kita. Hilangnya nyawa dan mata pencaharian, secara tidak merata memengaruhi perempuan, pemuda, masyarakat adat, masyarakat kasta rendah yang terdiskriminasi. Konservasi tidak boleh mengorbankan kehidupan masyarakat nelayan kita. Konservasi tidak boleh merampas dan mengusir masyarakat kita dari wilayah, ekologi, dan sumber daya tradisional kita. Tidak ada konservasi yang mengorbankan kehidupan masyarakat nelayan kita!

Daripada menambah legitimasi pada proses yang tidak demokratis dan solusi palsu yang dipromosikan oleh Konferensi Kelautan PBB, kami akan menyelenggarakan Konferensi Masyarakat Nelayan dan Air Laut.

Kami menegaskan kedaulatan dan hak adat kami, menata kembali masa depan kami di lautan, perairan, dan pesisir. Bersama-sama kami bergerak untuk melindungi wilayah dan hak kami sebagai masyarakat nelayan!

Kami menetapkan agenda; kami menunjukkan solusinya!

Komite Koordinasi WFFP